

MELEK HURUF, PENDIDIKAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Dadang S. Anshori

A. Sumber Daya Manusia dan Perubahan Global

Dalam masyarakat ada dua model perubahan, yakni perubahan akomodatif dan perubahan konfrontatif (Ulf Sundhaussen, 1996). Kedua perubahan tersebut hadir seiring dengan berbagai tuntutan dan gelombang besar dinamika. Mikhail Gorbacev dalam sebuah acara memperingati ke-80 Revolusi Rusia menyebutkan bahwa di saat perubahan besar melanda sebuah bangsa dan mereka yang berkuasa pada zamannya tidak bisa menjawab perubahan itu, maka satu-satunya jawaban adalah revolusi. Istilah revolusi sendiri secara ilmiah berbeda jauh dengan istilah sosiologis yang cenderung ekstrim sebagaimana diyakini masyarakat selama ini. Revolusi adalah sebuah perubahan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan berbangsa secara radikal. Kata radikal pun harus diterjemahkan ke dalam pengertian perubahan yang mengakar, maksudnya menyentuh persoalan rakyat sesungguhnya. Namun demikian, dalam mendorong perubahan besar tersebut, kata-kata almarhum Muhammad Hatta perlu kita catat, "Rakyat jelata (kaum proletar) seperti telah ditakdirkan menjadi tumbal elite politik yang berada di balik atas nama demokratisasi".

Untuk menghindari yang disebutkan terakhir itu, kecenderungan-kecenderungan perubahan besar dalam masyarakat harus ditangkap secara arif dan bijaksana dengan tetap mengedepankan rasionalitas dan objektivitas agar seluruh dinamika perubahan berjalan menuju poros tujuan yang sesungguhnya: kesejahteraan dan keadilan rakyat, integrasi bangsa, dan demokratisasi. Lebih dari itu kecenderungan perubahan harus dipahami dalam keterkaitannya dengan diskursus wacana sumber daya manusia yang menghendaki adanya perubahan-perubahan sosial (*social engineering*) sebagai produk langsung keberdayaan SDM Indonesia. Menurut Antropolog

kawakan, Prof. Koentjaraningrat (1994), secara sosial budaya, sumber daya manusia yang bermutu tidak hanya mampu dan tahan hidup dalam masa perubahan, berorientasi nilai budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) tetapi juga beradab dan beriman.

Langkah pertama dalam melakukan perubahan sosial adalah dengan cara mengubah pola pikir lama yang tidak relevan dengan tuntutan dan kecenderungan masa depan. Perubahan sosial yang bergerak melalui rekayasa sosial harus dimulai dari perubahan cara berpikir. Mustahil ada perubahan ke arah yang benar kalau kesalahan berfikir (*fallacy*), masih menghampiri benak kita masing-masing. Setelah itu kita mesti mengkampanyekan kepribadian inovatif secara besar-besaran di media massa dan di dunia pendidikan sehingga muncul kepribadian yang memberikan keterbukaan dan kreativitas (Jalaluddin Rakhmat, 1999).

Pengalaman selama 32 tahun pembangunan bangsa (ekonomi, politik, demokrasi, pendidikan, sosial dan budaya), dalam konteks rekayasa sosial merupakan kegagalan kita dalam menafsirkan kecenderungan-kecenderungan global masyarakat yang menghendaki perubahan-perubahan mendasar dalam pembangunan bangsa kita. Kesalahan pengambilan keputusan politis dalam kehidupan berbangsa bukan hanya berakibat salahnya menetapkan prioritas dan arah pembangunan, namun lebih jauh dari itu berakibat pada terganggunya dinamika sosial yang selama ini dianggap stabil. Fenomena-fenomena disintegrasi adalah akibat langsung dari pengambilan keputusan yang salah pada masa lalu. Untuk itu, kesediaan kita untuk mengubah cara pandang, pola pikir dan paradigma masa lalu yang lebih berorientasi pada kekuasaan dan sentralistik harus sudah berubah seiring dengan tuntutan demokratisasi, keterbukaan, dan tuntutan hak azasi manusia serta penegakkan hukum.

Paling tidak kita bisa menyimak perubahan-perubahan global dalam memasuki milenium ke-3 yang disaratkan UNDP (1999) sebagai karakteristik

perubahan yang mendasar dan berbeda dari sebelumnya; perubahan tersebut meliputi:

1. Pasar ekonomi baru; perdagangan internasional dan pasar uang sudah terintegrasi secara global dan beroperasi 24 jam sehari dari jarak jauh secara kilat. Pasar global melalui AFTA, NAPTA dan WTO mensyaratkan kesiapan profesionalisme dari semua bangsa. Pasar bebas tidak hanya bisa ditafsirkan sebagai peluang memperluas ekonomi kapital, namun juga sebuah bencana, apabila kemampuan kita masih berada di bawah standar negara-negara lain.
2. Perangkat komunikasi yang baru, alat komunikasi yang lebih cepat dan murah seperti internet cellular phones, fax machines dan komputer. Perangkat teknologi telah menghilangkan batas-batas negara dan masuk melalui kamar-kamar kita. Berbagai visi dan misi dari teknologi telah mampu menjadi sebuah budaya tanpa bentuk yang utuh dalam masyarakat kita. Kita bisa menjadi manusia serba bisa karena mudah mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan, namun juga kita bisa menjadi budak dan objek limbah teknologi informasi yang sengaja dibuang negara maju.
3. Pelaku yang baru; perusahaan multinasional yang mendominasi produksi dan bisnis dunia, WTO, pertumbuhan jaringan kerja (LSM) dan blok-blok kerjasama regional yang berkembang seperti Uni Eropa, Asean, AFTA dan banyak lagi yang lainnya. Kekuasaan negara menjadi tidak lebih berarti daripada kapital yang dimiliki oleh individu. Fenomena "George Soros" membuktikan bahwa institusi negara tidak cukup mampu menghadang kehendak-kehendak dari para kapitalis.
4. Aturan-aturan bermasyarakat internasional yang baru; persetujuan multilateral dalam perdagangan, bantuan dan hak-hak intelektual yang didukung oleh mekanisme yang mengikat serta membatasi kebijakan-kebijakan dan wewenang suatu negara. Kita tidak hanya menjadi warga

negara Indonesia, namun telah menjadi warga dunia yang harus sepakat dengan aturan main dunia. Kenyataan menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut dibuat hanya untuk menguntungkan negara-negara maju. Kebijakan hutang luar negeri, misalnya, menurut banyak kalangan hanya membuat negara penghutang tambah terpuruk. Kita masih ingat, menjelang Orde Baru berakhir, IMF memuji-muji Indonesia sebagai negara penghutang yang “baik”. IMF membuat prediksi-prediksi ekonomi yang meninabobokan bangsa ini. Namun tatkala krisis melanda Indonesia, IMF lupa akan pujian-pujiannya, bahkan terus menekan Indonesia dengan berbagai kebijakan ekonominya.

5. Mengglobalnya kehidupan politik internasional. Dengan berbagai media teknologi negara-negara yang dilanda kerusuhan (distabilitas), dengan mudah dapat diintervensi oleh negara-negara kuat. Kita tidak akan lupa bagaimana intervensi Australia terhadap referendum Timor-Timur sehingga provinsi tersebut harus diikhhlaskan ke luar dari NKRI. Demikian pula, indikasi keterlibatan pihak asing dalam berbagai kerusuhan di Indonesia, seperti Maluku, Irian Jaya dll. Tantangan terberat kita adalah mempertahankan integrasi bangsa dan memperkuat pertahanan batas teritorial dari berbagai intervensi pihak asing yang mengganggu keutuhan bangsa kita.

Dalam konteks Indonesia yang paling dekat, perubahan yang berada di pelupuk mata adalah krisis ekonomi sejak akhir 1997. Hingga kiini bangsa Indonesia belum memiliki formula yang cukup ampuh untuk menstabilkan kembali kondisi bangsa. Sekalipun kita telah memiliki pemerintahan yang legitimated, ternyata pemerintahan yang syah ini dipandang banyak pengamat belum cukup mampu memerintah secara baik. Bahkan kita dihadapkan pada disintegrasi horizontal dalam masyarakat yang paling bawah karena berbagai disparitas pemikiran, pilihan, dan kepentingan. Efek

langsung kondisi krisis terhadap keberlangsungan sumber daya manusia adalah:

1. Krisis ekonomi telah menyebabkan angka kemiskinan membengkak dari 11% (22 juta) pada 1996 menjadi 35% (79 juta) pada tahun 1998. Angka ini berdampingan dengan angka pengangguran baru karena putus hubungan kerja.
2. Meningkatnya jumlah putus sekolah. Saat ini sekitar 7 juta anak mengalami *drop out* karena ketidakmampuan membayar uang sekolah. Fenomena anak jalanan adalah efek dari kondisi sosial ekonomi yang memburuk dalam masyarakat.
3. Kriminalitas yang terus meningkat. Saat ini kita sering menyaksikan tindakan ekstrem masyarakat. Tindakan masyarakat yang main hakim sendiri termasuk pembakaran kantor-kantor kepolisian adalah perbuatan yang tidak bisa ditolelir. Namun masyarakat sangat sulit untuk diajak berpikir rasional. Untuk urusan kriminalitas kita dalam kondisi siaga I.
4. Persoalan kesehatan yang menurun karena kemampuan masyarakat. Data kuantitatif menunjukkan bahwa penyebab kematian bayi adalah sistem pernafasan (30,8%), perinatal (21,6%), diare (15,3%), infeksi/parasit (6,3%), polio-3 (89,5%) pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (59%), pelayanan kesehatan bagi bayi (69,8%). Jumlah anak yang kekuarangan gizi akibat krisis moneter mencapai 50% dari 23 juta jumlah anak Indonesia (Sambas Wirasudiria, 1999).

Istilah sumber daya manusia (SDM) muncul bersamaan dengan kecenderungan pembangunan manusia dari orientasi fisik (material) kepada pembangunan manusia. Saat kita menyadari bahwa seluruh potensi alam (sumber daya alam) bisa habis dan kita bisa miskin karena ketidakmampuan mengolah sumber daya alam tersebut, sementara di sisi lain kita menyaksikan negara-negara, seperti Singapura yang tidak sekaya kita dalam kekayaan alamnya, memiliki tingkat kemakmuran yang jauh di atas negara

kita, orientasi pembangunan kita arahkan pada pembangunan manusia. Dengan demikian, nantinya kita tidak hanya bisa menonton orang-orang lain yang kita bayar mengolah kekayaan alam, mengeruk habis kekayaan kita, bahkan mengibuli data-data kuantitatif kekayaan kita, justru kita yang akan mengolahnya demi kepentingan bangsa kita sendiri.

Oleh karena istilah SDM ini hadir di tengah masyarakat kita menyertai industrialisasi, ada juga orang yang mengkritik istilah tersebut. Di antaranya, budayawan Emha Ainun Nadjib menyebutkan bahwa SDM lahir karena keperluan industrial. Industrialisasi lahir dari sebuah visi dan versi pandangan yang dominan mengenai perkembangan dan kemajuan hidup. Maka tekanan makna sumber daya manusia adalah daya manajerial, profesional, dan keterampilan kerja. Konsep sumber daya manusia, menurut Emha Ainun Nadjib mengaksentuasikan diri pada kesanggupan untuk produktif. Sayangnya, hegemoni ini lebih kental diwarnai budaya Barat dibandingkan budaya masyarakat kita sendiri, sehingga seiring dengan berbagai perubahan dalam kontruks bernegara dan pembangunan, maka istilah itu menjadi tidak laku lagi dalam masyarakat kita, sementara esensi dari istilah tersebut hingga kini masih samar-samar kita maknai.

Terlepas dari kritik di atas, kita melihat bahwa pembangunan yang sifatnya fisik dibutuhkan kita selama proses bernegara ini menghendaki adanya kesejahteraan yang konkret dalam masyarakat. Namun demikian, sebagai sebuah produk budaya, SDM juga harus dilandasi kehadiran budaya bangsa yang berbeda jauh dengan budaya Barat yang hampir mereduksi seluruh makna pembangunan kita saat ini. Untuk itulah di dalam produktivitas kita harus menaruh sikap empati dan hati nurani untuk berpikir sosial kepada orang lain. Kecerdasan intelektual dirasakan belum cukup andaikan kita tidak memiliki kecerdasan emosional, bahkan kecerdasan spiritualitas. Kita juga membutuhkan suasana hati ketika penderitaan orang lain menjadi penderitaan kita sendiri, ketika etika mampu meruntuhkan egoisme dan nafsu

berkuasa. Kita juga berkepentingan dengan SDM yang mampu memahami derita dan suara hati rakyat yang selalu menjadi korban ketidakpahaman elit politik.

Oleh karena itu, hal yang pertama kali harus dipahami dalam membicarakan wacana SDM adalah kesiapan kita untuk menangkap makna perubahan yang terjadi di masyarakat. Kesalahan memaknai perubahan dalam masyarakat sebagaimana yang dikatakan Mikhail Gorbacev hanya akan melahirkan revolusi dalam makna yang sangat ekstrem, yaitu kondisi negara yang chaos. Padahal Kontjaraningrat (1996) telah menggambarkan bahwa SDM berkualitas memiliki daya integrasi yang tinggi, nasionalisme dan solidaritas, toleransi terhadap realitas perbedaan, mampu menangkap seluruh potensi perpecahan sebagai akibat dari perbedaan. Sementara perbedaan itu sendiri menjadi satu keniscayaan dalam masyarakat kita. Inilah kira-kira yang sering disebutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, bahwa kejujuran, toleransi, empati, keberpihakan pada rakyat jauh lebih penting dan mengalahkan seluruh atribut intelektual (penguasaan ilmu pengetahuan). Namun demikian, kejujuran, toleransi, empati, keberpihakan pada rakyat juga harus ditegakkan dengan rasionalitas, sikap objektif, sistematis, terencana, dan penuh kematangan berpikir sehingga proses pembangunan berjalan secara baik.

B. SDM Jawa Barat dalam Indeks Pembangunan Manusia

Menurut laporan UNDP (United Nations development Programme) dalam *Human Development Report 2000*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau kualitas SDM Indonesia berada pada urutan ke-109 setelah Vietnam. Posisi ini menurun empat digit dibandingkan dengan tahun 1999 (urutan ke-105), 1995 (urutan ke-96). HDI (*human development index*) sendiri diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu pembangunan manusia tingkat tinggi (*high human development*), kelas sedang (*medium human*

development), dan kelas rendah (*low human development*). Lima besar HDI diduduki oleh Kanada, Norwegia, Amerika Serikat, Australia dan Iceland (Islandia). Mari kita bandingkan Indonesia dengan negara Asean dalam klasifikasi tersebut sebagaimana tabel berikut:

Human Development Indek (HDI)

High human development (Rank 1-46)	Medium human development (Rank 47-139)	Low human development (Rank 140-174)
1. Kanada 2. Australia 3. Amerika 9. Jepang 24. Singapura 32. Brunei	61. Malaysia 76. Thailand 77. Filipina 108. Vietnam 109. Indonesia 125. Myanmar	142. Sudan 148. Banglades 151. Nigeria 158. Uganda 171. Ethiopia 174. Sierra Leone

Sumber: HDR 2000

Human developmen index (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM) dikeluarkan sejak 1990. Sejak itu ukuran kemajuan sebuah bangsa tidak lagi berdasarkan pendapatan perkapita melainkan dihitung berdasarkan tiga komponen penting, yakni angka harapan hidup (*longevity*), angka lama pendidikan (*knowledgeable*), dan menikmati tingkat hidup yang layak yang ditandai dengan daya beli (*decent standard of living*) atau konsumsi perkapita. Indikator yang digunakan untuk ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator	Minimum	Maksimum
Harapan hidup	25 tahun	85 tahun
Tingkat melek huruf	0%	100%
Lama sekolah	0 tahun	15 tahun
Konsumsi perkapita	Rp 300.000,-	Rp. 732.720,-

Sumber: UNDP, 1990

Perubahan paradigma pengukuran kualitas pembangunan manusia ini memberikan wacana dan makna baru bagi pengembangan sumber daya manusia secara benar sebagai subjek pembangunan. Maka dengan ukuran-ukuran di atas sangat mungkin negara dengan kekayaan dan pendapatan negara sangat tinggi, memiliki angka IPM yang rendah karena mengesampingkan ketiga komponen tersebut. Dalam konteks Indonesia hal ini sejalan dengan rencana pembangunan sumber daya manusia menuju manusia Indonesia seutuhnya. Sumber daya manusia pada tingkat makna sosiologis, sementara manusia Indonesia seutuhnya pada tataran idealisme.

Berdasarkan laporan UNDP (1999) dalam rangka menghadapi abad global di milenium ke-3 ini diperlukan pemikiran kembali yang mendasar atas kebijakan dan manajemen dengan menempatkan 5 prioritas, yakni (1) menempatkan persoalan kualitas dan hak azasi manusia sebagai inti kebijakan dan aksi internasional, (2) melindungi keamanan dan kerawanan sumber daya manusia yang mengalami krisis ekonomi, (3) meningkatkan posisi interaksi dari negara-negara miskin dalam aktivitas global, (4) memperpendek ketimpangan di antara dan di dalam negara masing-masing, serta (5) menyiapkan tatanan global yang diperlukan untuk awal milenium ke-3.

Dengan berlandaskan indikator global di atas, marilah kita lihat kondisi SDM Jawa Barat secara lebih dekat dan objektif. Jawa Barat dengan posisi geografis sebagai penyangga Ibu Kota Jakarta dalam konteks pembangunan SDM memiliki banyak kepentingan. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk nomor dua setelah DKI Jakarta, sekitar 42 juta. Jumlah penduduk ini mencapai 20% dari penduduk nasional. Namun demikian, Jawa Barat sarat dengan persoalan-persoalan pembangunan, mulai dengan masalah pembangunan fisik, sosial, dan pembangunan sumber daya manusianya. Dengan melihat ketiga indikator tersebut, kita simak sekilas tentang SDM Jawa Barat.

- **Angka Harapan Hidup (AHH)**

Penduduk Jawa Barat sejak 1994-1998 memiliki rata-rata angka harapan hidup selama 61,21 tahun. Rata-rata angka harapan hidup tertinggi dimiliki Kota Bogor (73,38 tahun), kemudian Kota Sukabumi (65,99 tahun). Kabupaten yang rata-rata angka harapan hidupnya rendah adalah Serang (55,58 tahun), Karawang (57,82 tahun), dan Indramayu (57, 86 tahun). Namun demikian, indikator kesehatan di tiga kabupaten tersebut selama kurun waktu 1994-1998 mengalami peningkatan yang baik.

- **Indikator Pendidikan**

Indikator pendidikan ini dibagi menjadi dua komponen, yakni angka lama sekolah (ALS) dan angka melek huruf (AML) yang kemudian digabungkan dalam komponen indeks pendidikan. Pada periode 1994-1998 angka lama sekolah di Jawa Barat adalah 6,39 tahun. Dengan demikian rata-rata penduduk Jawa Barat baru mengenyam sekolah dasar. Angka lama pendidikan terbesar adalah Kota Bandung, yakni 9,61 tahun sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Indramayu sebesar 3,8 tahun. Angka melek huruf di Jawa Barat sebesar 91,41%, yang berarti di Jawa Barat masih terdapat penduduk yang buta huruf sebesar 8,59%. Angka melek huruf tertinggi terdapat di Kota Sukabumi sebesar 98,68% sedangkan angka melek huruf terendah adalah Kabupaten Sukabumi, yakni sebesar 69,02% yang berarti kabupaten tersebut masih memiliki sebanyak 30,98% masyarakat buta huruf.

- **Standar Hidup atau Daya Beli**

Indikator ini dihitung dari konsumsi perkapita pertahun yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi setempat. Rata-rata konsumsi perkapita Jawa Barat dari tahun 1994-1998 sebesar Rp 555.870,- pertahun perorang.

Standar hidup tertinggi adalah Kota Cirebon sebesar Rp 635.310,- kemudian Kota Sukabumi (Rp 600.390,-) dan Kota Bogor (Rp 571.500,-) sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lebak (Rp 504.600,-), Pandeglang (Rp 520.180,-) dan Kota Tangerang (Rp 549.690,-). Perbedaan antara konsumsi tertinggi dan konsumsi terendah di Jawa Barat sebesar Rp 130.700,-.

Dengan penghitungan kuantitatif berdasarkan standar global IPM, maka diperoleh angka indeks pembangunan manusia atau kualitas sumber daya manusia Jawa Barat sejak 1994-1998 sebesar 0,649. Bila kita melihat klasifikasi standar UNDP, maka IPM Jawa Barat termasuk katagori medium. Nilai IPM tertinggi dimiliki Kota Bogor sebesar 0,76 dan terendah adalah Kabupaten Indramayu sebesar 0,563. Beberapa daerah memiliki IPM di atas rata-rata Jawa Barat, yakni Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang dan Kabupaten Ciamis. Data lengkap mengenai IPM daerah di Jawa Barat disajikan dalam tabel berikut:

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tahun 1994-1998**

No.	Kabupaten	1994	1995	1996	1997	1998	Rata-Rata	Rata-Rata Pert (%)
1	Pandeglang	0,581	0,606	0,636	0,654	0,548	0,605	-1,044
2	Lebak	0,555	0,578	0,618	0,618	0,633	0,553	0,587
3	Bogor	0,612	0,633	0,671	0,691	0,632	0,648	0,982
4	Sukabumi	0,572	0,596	0,653	0,661	0,645	0,626	3,149
5	Cianjur	0,600	0,627	0,658	0,685	0,666	0,647	2,685
6	Bandung	0,627	0,661	0,690	0,734	0,642	0,671	0,906
7	Garut	0,596	0,622	0,649	0,676	0,608	0,630	0,710
8	Tasikmalaya	0,600	0,624	0,662	0,693	0,646	0,645	1,973
9	Ciamis	0,613	0,643	0,670	0,702	0,659	0,657	1,950
10	Kuningan	0,627	0,648	0,681	0,709	0,674	0,668	1,903
11	Cirebon	0,600	0,625	0,651	0,669	0,576	0,624	-0,674
12	Majalengka	0,587	0,612	0,655	0,685	0,629	0,634	1,940
13	Sumedang	0,643	0,667	0,700	0,714	0,659	0,676	0,776

14	Indramayu	0,512	0,543	0,586	0,604	0,571	0,563	2,896
15	Subang	0,592	0,617	0,658	0,681	0,644	0,639	2,226
16	Purwakarta	0,595	0,628	0,655	0,669	0,632	0,636	1,641
17	Karawang	0,543	0,575	0,620	0,653	0,573	0,593	1,697
18	Bekasi	0,669	0,663	0,679	0,712	0,600	0,665	-2,328
19	Tangerang	0,601	0,618	0,648	0,654	0,614	0,627	0,655
20	Serang	0,547	0,574	0,619	0,660	0,585	0,597	2,022
21	K. Bogor	0,880	0,720	0,757	0,777	0,665	0,760	-6,199
22	K. Sukabumi	0,847	0,717	0,745	0,764	0,663	0,747	-5,540
23	K. Bandung	0,695	0,730	0,758	0,771	0,659	0,723	0,987
24	K. Cirebon	0,676	0,729	0,762	0,805	0,762	0,747	3,162
25	K. Tangerang	0,609	0,648	0,684	0,726	0,631	0,660	1,259
26	K. Bekasi	-	-	-	-	-	-	-
	Jawa Barat	0,619	0,639	0,671	0,697	0,617	0,649	0,154

Sumber: Data BPS (diolah kembali)

C. Strategi Pembangunan SDM Melalui Pendidikan

Dalam rangka mencapai tingkat kualitas sumber daya manusia (IPM) yang baik, maka orientasi pembangunan manusia harus diprioritaskan pada tiga bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketiganya dihadirkan dengan tidak mengesampingkan faktor lain, sosial, budaya, politik, pers, demokrasi dan industri. Dalam konteks IPM semua produk pembangunan bermuara pada tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan (ekonomi) dan tingkat kesehatan. Kesehatan bersignifikansi dengan masalah ekonomi. Krisis ekonomi telah menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan, sebab biaya kesehatan dirasakan masyarakat semakin berat. Dalam ekonomi, Jawa Barat memiliki potensi agroindustri yang sangat kaya. Namun, kita masih belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut.

Dalam masalah pendidikan kita menghadapi dua masalah besar, yakni tingkat partisipasi masyarakat dan produktivitas SDM. Jawa Barat dalam konteks ini memiliki banyak peluang karena menjadi basis perguruan tinggi bergengsi di tanah air. Namun demikian, keberadaan perguruan tinggi

tersebut untuk meningkatkan sumber daya manusia Jawa Barat belum terlaksana secara maksimal. Menjelang otonomi daerah, kita menghadapi perguruan tinggi tersebut bukan hanya menjadi stasiun kaum urban yang hendak belajar di kota Bandung, namun memiliki makna yang berarti bagi pertumbuhan angka pendidikan di Jawa Barat. Kita lihat kondisi pendidikan masyarakat Jawa Barat dalam tabel berikut:

Penduduk Jawa Barat berdasarkan Strukur Pendidikan (1998)

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Tamat SD-MI	15.503.795	37,91
2	Tamat SLTP sederajat	5.259.266	12,86
3	Tamat SLTA sederajat	4.089.632	10,00
4	Tamat SMK sederajat	1.259.606	3,08
5	Tamat Diploma I/II	318.991	0,78
6	Tamat Diploma III	384.425	0,94
7	Tamat Sarjana (S1)	560.279	1,37
8	Tamat S2/S3	20.448	0,05

Sumber: Susenas 1998

Angka Partisipasi Sekolah di Jawa Barat (1997-1999)

No.	Jenjang Pendidikan	1997	1998	1999
1	SD	93,13%	92,71%	93,33%
2	SLTP	55,27%	54,15%	56,45%
3	SMU	32,38%	34,08%	35,62%

Dari data di atas, kita bisa memprediksi persoalan pendidikan yang harus segera diselesaikan. Penduduk Jawa Barat yang memiliki perguruan tinggi besar baru mencapai tingkat sekolah dasar (6,39 tahun). Penduduk Jawa Barat dengan pendidikan sarjana hanya mencapai 1,37% sedangkan penduduk yang menyelesaikan S2/S3 lebih kecil lagi, hanya mencapai 0,05%. Hal ini berarti secara rata-rata pendidikan masyarakat Jawa Barat

masih terhitung rendah. Maka orientasi pendidikan dalam rangka meningkatkan IPM harus beracuan pada meningkatkan lama pendidikan.

Di samping itu, dalam rangka menuntaskan Wajib Dikdas 9 tahun yang harus selesai pada tahun 2003, merupakan agenda besar yang mesti diperhatikan. Hingga tahun 2003, Jawa Barat harus mengentaskan atau meningkatkan angka partisipasi pendidikan tingkat SLTP hingga 85%. Artinya selama 3 tahun ke depan Jawa Barat harus mampu mendongkrak angka partisipasi pendidikan sekitar 28,55%. Ini bukan pekerjaan yang mudah mengingat kemampuan PAD di daerah dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarganya. Demikian pula, Jawa Barat masih memiliki masyarakat buta huruf sebanyak 8,59%.

Pendidikan telah diyakini keberperannya dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga telah mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karena itu agar kebijakan pendidikan memiliki makna yang simultan dengan standar global IPM, maka langkah-langkah strategis perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Barat. Langkah tersebut adalah:

1. Meningkatkan lama belajar masyarakat Jawa Barat. Pendidikan harus dipahami sebagai *human investment*. Investasi melalui pendidikan memang tidak pragmatis didapati secara langsung. Namun mengingat berbagai potensi alam bangsa kita, Jawa Barat khususnya, diperlukan sumber daya manusia yang handal. Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam UU Pendidikan Nasional No. 2/1989 mencakup dua sektor, pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Di samping meningkatkan partisipasi masyarakat secara formal, keterampilan yang praktis yang diberikan melalui pendidikan luar sekolah hendaknya mendapat perhatian serius. Pemberdayaan pendidikan masyarakat juga bisa dilakukan melalui program paket dan ujian persamaan dengan standar yang sama dengan pendidikan sekolah.

2. Peningkatan secara kualitas maupun kuantitas lembaga pendidikan yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat perlu mengembangkan pendidikan yang benar-benar dibutuhkan untuk pembangunan daerah. Potensi Agrobisnis kita misalnya, merupakan sebuah tantangan bagi institusi pendidikan di Jawa Barat. Jurusan-jurusan yang dikembangkan di perguruan tinggi hendaknya tidak hanya berkontribusi pada skala nasional dan global, melainkan juga regional dan lokal yang secara teknis sangat bermanfaat bagi proses pembangunan Jawa Barat.
3. Peningkatan kaum terdidik di dalam masyarakat melalui berbagai aktivitas kemasyarakatan dalam rangka pengentasan buta huruf yang berjumlah 8,95%. Ini perlu dilakukan secepatnya, mengingat masyarakat kita sebentar lagi memasuki abad ilmu pengetahuan, yang berkonsekuensi pada mengglobalnya informasi dunia. Sementara kemampuan baca tulis adalah keterampilan mendasar yang harus dimiliki dalam mengembangkan diri dengan dunia luar.
4. Meningkatkan jumlah manusia terdidik pada tingkat diploma, sarjana, serta pascasarjana. Manusia terdidik ini diharapkan memiliki produktivitas untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pun ini perlu ditegaskan mengingat keterbatasan pemerintah dalam melakukan berbagai program kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka manusia terdidik yang akan membawa visi ke depan daerah sangat diperlukan.

Dari data-data dan upaya di atas, diharapkan SDM Jawa Barat menuju suatu peningkatan dengan tetap mengikutsertakan peran aktif secara dominan masyarakat Jawa Barat dalam semua aktivitasnya.

]

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Dewi Fortuna. 1993. *Pembangunan Regional & Segitiga Pertumbuhan*. Jakarta: Cides.

From, Erich. 1987. *Memiliki dan Menjadi*. Jakarta: LP3ES.

Habibie, BJ. 1992. *Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: BPPT.

Human Development Report 2000

Koentjaraningrat. 1994. "Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Bermutu". *Kompas*, 23-24 Pebruari 1994

_____. 1990. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan

Laporan Susenas 1998

Majalah Prisma, No. 3, Tahun 1996

Majalah Sintesis, No. 16, Tahun 4, Maret-April 1996

Mimbar Pendidikan, No. 3 Tahun XII, 1993

Rakhmat, Jalaluddin, 1999. *Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Ringkasan Pembangunan Manusia Indonesia 1996. Publikasi UNDP dan BPS

Suparmoko. 1994. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPFE.

Wiradisuria, Sambas. 1999. "Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi, Melalui Pendekatan Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Menyongsong Millenium Ke-3". Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Padjajaran Bandung